



BNPB

**Laporan Tahunan
Layanan Informasi Publik PPID BNPB Tahun 2021**



Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Kata Pengantar	ii
Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik	1
Maksud dan Tujuan	1
Pelaksanaan Kegiatan	2
Inovasi Pelayanan Informasi	2
Sekilas tentang INALOG PB	3
Kegiatan PPID	4
Kegiatan PPID BNPB dalam Pelayanan Permohonan Informasi	5
Capaian dan Output PPID	7
Penutup	8
Lampiran Foto Kegiatan PPID	9
Piagam Penghargaan kategori menuju Informatif	10

Kata Pengantar

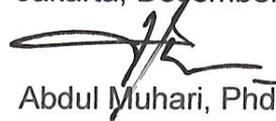
Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana

Saat terjadi bencana dan merebaknya pandemi Covid-19 masyarakat sangat membutuhkan informasi yang akurat dan cepat. Hal ini sesuai Keterbukaan Informasi Publik yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14/2008 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan. UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap setiap orang untuk memperoleh informasi publik, dan karenanya kini setiap badan publik berkewajiban menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat, dan efisien.

Pentingnya komunikasi efektif saat bencana alam dan pandemi Covid-19 agar masyarakat menerima pesan dari sumber yang jelas. Selain itu masyarakat dapat menerima informasi yang telah dikelola dengan keteraturan dan terkoordinasi secara integratif. Kita telah memasuki sebuah situasi “krisis”. Kondisi ini terkait erat pada urbanisasi, pertumbuhan penduduk, mobilitas global, alih fungsi lahan, dan perubahan iklim. Dalam kondisi ini, ada kebutuhan untuk memperbaiki cara dan sikap menghadapi wabah dan penanggulangan bencana. Keterbukaan atas informasi adalah hal kunci, selain memperkuat kapasitas anggota masyarakat.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berkewajiban untuk melaporkan Laporan Pelayanan Informasi Publik setiap tahunnya berdasarkan UU tersebut. Secara garis besar, laporan ini memuat inovasi dalam pelayanan informasi publik, dinamika permohonan informasi beserta kendala dan rekomendasinya. Kiranya laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas layanan kepada pemohon informasi di BNPB.

Jakarta, Desember 2021



Abdul Muhari, Phd.

Laporan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan SP4N Lapor Tahun 2021

I. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi menjadi satu hal wajib yang harus disediakan oleh seluruh badan publik di Indonesia. Setiap badan publik wajib menyediakan informasi yang diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta merta, informasi yang tersedia setiap saat serta informasi yang diminta masyarakat tetapi diluar informasi yang dikecualikan. Sehingga Badan Publik harus menyiapkan secara matang mengenai informasi apa saja yang masuk kedalam informasi dikecualikan sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam praktek penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Keterlibatan dari semua pihak dalam badan publik tersebut sangat penting karena Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan kewajiban dari semua instansi bukan hanya tanggung jawab dari satu orang yang telah ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memiliki 6 unit Eselon I yaitu Sekretaris Utama, Inspektorat Utama, Deputi bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Deputi bidang Penanganan Darurat, Deputi bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi, dan Deputi Logistik Peralatan.

Masing-masing unit kerja Eselon 1 memiliki unit kerja Eselon 2 dibawahnya yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda. Adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, diharapkan semua Eselon 1 dan yang ada dibawahnya saling berkoordinasi dalam penyampaian informasi serta data yang dimiliki dan menyampaikannya kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

II. Maksud dan Tujuan

Maksud dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan BNPB sebagai acuan bagi setiap unit kerja Eselon I dan II serta jajaran dibawahnya dalam penyediaan, pengumpulan, pendokumentasian dan pelayanan

informasi publik serta adanya keseragaman informasi yang diberikan kepada publik. Selain itu dengan ditetapkannya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi maka dibutuhkan orang yang memiliki kompetensi dan bertanggung jawab penuh dalam pelayanan informasi publik. Sedangkan tujuan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta memberikan informasi yang berada dibawah naungan BNPB secara cepat dan tepat.

III. Pelaksanaan Kegiatan

Terselenggaranya pelayanan informasi yang bersifat publik diumumkan melalui berbagai bentuk dan media (media online):

- a. Informasi publik yang tersedia dan diumumkan secara berkala dilayani melalui Website BNPB.
- b. Permintaan informasi yang dikategorikan wajib tersedia setiap saat tetapi tidak melalui website melainkan melalui meja layanan informasi publik.
- c. Mekanisme Pelayanan Informasi yang tersedia setiap saat atas permintaan secara tertulis Langkah-langkah dalam mekanisme pelayanan informasi yang harus tersedia setiap saat meliputi:
 - Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID,
 - PPID menerima permohonan informasi,
 - PPID melakukan pencatatan permintaan informasi dari pemohon untuk kepentingan tertib administrasi. Untuk mempermudah masyarakat dalam meminta informasi publik, PPID, menyiapkan Formulir Permintaan informasi.

IV. Inovasi Pelayanan Informasi

Kedeputan bidang Logistik dan Peralatan BNPB melakukan inovasi baru dengan aplikasi INALOG PB dalam efektivitas pengelolaan data ketersediaan logistik di Indonesia. Inovasi dalam pengelolaan logistik ini diharapkan menjadikan tata kelola yang baik di daerah maupun nasional. Tantangan kedepannya adalah selalu melakukan inovasi dalam pelayanan publik. Berinovasi dan kolaborasi, berinovasi dalam proses, serta berinovasi dalam pelayanan publik ke masyarakat, BPBD dan terbuka dalam menerima perubahan. Selain itu, pentingnya teknologi yang

mendukung sistem logistik penanggulangan bencana akan meningkatkan efektifitas pemberian bantuan logistik dari pusat ke daerah dan masyarakat.

Teknologi informatika menjadi sangat penting dan sangat diperlukan saat melakukan perencanaan sampai dengan penghapusan untuk melakukan efisiensi waktu menjadi lebih cepat. BNPB saat ini sudah melakukan kerjasama dengan Bukalapak, Garuda, dan dunia usaha untuk melakukan percepatan pengiriman logistik. Kerjasama dengan Pentahelix (pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi dan media) akan lebih banyak peluang melakukan terobosan-terobosan.

Proses siklus logistik dalam penanggulangan bencana dalam beberapa tahap, yaitu perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan/pegudangan, distribusi, dan penghapusan. "Model barcoding dan aplikasi Inalog PB, merupakan salah satu teknologi yang dapat kita lakukan dalam manajemen pergudangan.

Tantangan ke depan yang akan dihadapi, antara lain adalah :

1. Lingkungannya berubah, dituntut memberikan layanan dengan cara lebih baik, kualitas lebih baik, dan lebih cepat. Artinya dituntut melaksanakan tugas dan fungsi dengan lebih efisien dengan dukungan teknologi informatika.
2. Jarak/gap antara kebutuhan infra struktur dan persepsi pengelola masih lebar.
3. Investasi pengembangan infrastruktur masih kecil dan pendelegasian wewenang inovasi belum optimal.
4. Penyelenggaraan negara wajib mengelola sistem informasi diatur UU No. 25 tahun 2009.
5. Pasal 23 ayat 4. Serta PermenPanRB 13 tahun 2017, pasal 3 pimpinan penyelenggara negara wajib memastikan penyediaan informasi pelayanan publik.

Dampak positif penggunaan IT adalah pelayanan menjadi lebih baik kepada masyarakat, peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat umum, pemberdayaan masyarakat melalui informasi mudah diperoleh, dengan adanya informasi yang mencukupi masyarakat akan belajar untuk menentukan pilihannya sendiri, hilangnya birokrasi yang panjang. Adanya e-government sekarang ini akan berimbas pada sumber daya manusia di setiap pelayanan publik.

V. Sekilas tentang INALOG PB

INALOG PB adalah aplikasi Web-Based yang hanya membutuhkan Browser (mesin pencarian) dan koneksi internet. Dalam hal ini unit Logistik BNPB

menggunakan browser Google Chrome yang mempunyai kelebihan proses loading lebih cepat, karena membutuhkan resources yang rendah.

Aplikasi ini merupakan aplikasi untuk pergudangan logistik yang mempunyai fitur barang masuk, barang keluar, proses pengiriman barang, dan pelaporan data gudang. Hal yang berbeda ada pada menu cetak BAST dan terlihat lokasi sebaran penyediaan barang di Provinsi, kabupaten / Kota.

Kelebihan utama aplikasi ini dapat digunakan secara online dan offline. Pada saat input data secara online, pengguna dapat mengisi manual dengan kolom-kolom yang sudah disediakan kemudian klik save, maka data akan otomatis tersimpan jika internet dalam keadaan stabil. Sedangkan via Offline, pengguna harus mendownload Excell yang sudah disetting atau dibuatkan tabel-tabelnya, kemudian diisi secara manual hingga data sudah terinput semua. Jika sudah selesai bisa di attach file kembali ke aplikasi INALOG PB, maka sistem akan otomatis mengolah data tersebut dan dapat dijadikan database.

VI. Kegiatan PPID

Selain memberikan pelayanan informasi kebencanaan secara rutin PPID juga melaksanakan kegiatan rapat koordinasi dan pelatihan-pelatihan bagi anggota PPID untuk meningkatkan kualitas pelayanan sebagai berikut:

1. Pelatihan dalam memberikan informasi saat Pandemi Covid-19 dengan menghadirkan narasumber staf ahli Komisi Informasi Pusat dan Humas Lapan pada (31/03) di Hotel Milenium, Jakarta Pusat.
2. Pelatihan Teori dan Praktek Pengelolaan Aplikasi SP4N Lapor, Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), Merancang Standar Pelayanan Publik dan Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan pada (22-23/6) di Hotel Grand Mercure, Jakarta Pusat.
3. Rapat Zoom Meeting terkait Data Dukung untuk Kuesioner pada Aplikasi e-Monev pada (21/7). Mendukung kuestioner dalam keterbukaan informasi public.
4. Pelatihan dalam Pedoman Umum Rencana Aksi SP4N Lapor, dan Bimbingan Teknis Rencana Aksi SP4N Lapor pada (28/10) di Hotel Ibis-Senen, Jakarta Pusat

5. Monitoring dan evaluasi PPID, untuk studi banding dalam standar pelayanan publik dan keterbukaan informasi publik di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat pada 6 s/d 8 Desember 2021.

VII. Kegiatan PPID BNPB dalam Pelayanan Permohonan Informasi

Pelayanan informasi yang diberikan seputar perkembangan kejadian bencana, edukasi dalam penanggulangan bencana dan informasi Covid-19. Dalam memberikan pelayanan PPID BNPB Selama tahun 2021 BNPB tidak memperoleh permohonan informasi datang langsung ke kantor BNPB, mayoritas pemohon informasi melalui email BNPB.

Rekapitulasi informasi masuk Januari s/d Desember 2021

Bulan	Jumlah	Keterangan
Januari	1	sudah dijawab
Februari	3	sudah dijawab
Maret	6	sudah dijawab
April	2	sudah dijawab
Mei	-	
Juni	6	sudah dijawab
Juli	6	sudah dijawab
Agustus	1	sudah dijawab
September	2	sudah dijawab
Oktober	1	sudah dijawab
November	1	sudah dijawab
Desember	1	sudah dijawab
Total	30	sudah dijawab

Selain melayani permohonan informasi melalui email PPID dan website BNPB. Tim PPID BNPB juga bertugas melayani pelaporan dari aplikasi lapor. Sejak ditetapkan pada tahun 2015, SP4N LAPOR! adalah aplikasi pengaduan layanan publik satu pintu yang terintegrasi secara nasional. Melalui Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), SP4N LAPOR. Dalam melayani pelaporan terkait Covid-19 dalam aplikasi lapor petugas PPID berdasarkan surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi

dan Birokrasi Republik Indonesia tentang Mekanisme khusus dalam Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)-Lapor dalam rangka mendukung penanganan dampak Covid-19 di lingkungan pemerintah.

Lampiran Rekapitulasi Layanan Aplikasi Lapor Periode Januari s/d Desember 2021

Tanggal	Nama Pelapor	Judul Laporan	Status Laporan
22 Feb 2021	Henry	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Bnpb)	Terverifikasi
23 Feb 2021	Ayik Budhi Poerwanto	Terdampak Luapan Kali Ciliwung	Terverifikasi
1 Mar 2021	Feriadi Siregar	Pengajuan Proposal	Ditutup oleh Sistem
1 Mar 2021	Henry	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Bnpb)	Terverifikasi
7 Mar 2021	Jessica Marcheline	Surat Keberatan Atas Keterlambatan Pembayaran Insentif Tracer	Ditutup oleh Sistem
15 Mar 2021	Wahyu Kristianto	Penerbangan Internasional.	Terverifikasi
30 Mar 2021	Aku Takut	Korupsi Pengadaan Barang Huawei Dan Pinjaman World Bank Yang Tidak Terencana	Ditutup oleh Sistem
16 Apr 2021	Khansa Ghea Fitria	Simulasi Tanggap Bencana	Ditutup oleh Sistem
24 Apr 2021	Ilham	Larangan Keluar-Masuk Negara	Terverifikasi
27 May 2021	628521324xxxx	Permohonan Bantuan	Ditutup oleh Sistem
30 May 2021	Ghina Fujiawati	Permohonan Informasi Intern/magang	Ditutup oleh Sistem
8 Jun 2021	Ayu Hidayah Aslamiah	Evaluasi Kembali Peraturan Yang Sedang Dijalankan	Terverifikasi
4 Jul 2021	Ayu Hidayah Aslamiah	Aspirasi #5673267 Yang Tidak Ditanggapi Dan Evaluasi Kembali Peraturan Terkait Covid-19	Ditutup oleh Sistem
13 Sep 2021	Ilham Setiawan	Penyalah Gunaan Bantuan Bnpb Oleh Anggota Dpr Ri	Terverifikasi
6 Oct 2021	Koto Tingga	Bencana Tanah Longsor	Ditutup oleh Pelapor
5 Nov 2021	Theresia Gita Hapsari	TCA (Travel corridor arrangement) scheme	Ditutup oleh Sistem
8 Dec 2021	Ahmad Syarifudin	Pengadaan Kantor Relawan Penanggulangan Bencana Alam Disetiap Desa	Ditutup oleh Sistem
16 Dec 2021	Muhammad	Ketidaksesuaian Perlakuan Kepada Tenaga Kontrak Di Bnpb	Ditutup oleh Sistem

VIII. Capaian dan Output PPID BNPB

- a. Mendukung Keterbukaan Informasi dengan melakukan rapat dengan narasumber Komisioner Komisi Informasi Pusat, dan membahas materi Strategi dan Tantangan penyebaran informasi saat Pandemi Covid-19 dengan narasumber dari Badan Lapan, kemudian membahas Uji Konsekuensi informasi dikecualikan dengan narasumber dari Kominfo.
- b. Mendukung Reformasi Birokrasi, dengan pelatihan teori dan praktek Aplikasi SP4N-Lapor, Sistem Pelayanan Informasi Pelayanan Publik, Merancang Standar Pelayanan Publik dengan menghadirkan 3 narasumber dari Kemenpan-RB
- c. Bersinergi dengan admin aplikasi lapor kemenpan RB dan BNPB dalam pelayanan informasi terkait Covid-19 dan penanggulangan bencana, output yang dihasilkan laporan pelayanan informasi terkait covid-19 di aplikasi SP4N-Lapor (terlampir)
- d. Pengembangan website PPID BNPB dengan output terwujudnya pelayanan informasi berbasis online.
- e. Pencapaian BNPB pada kategori keterbukaan informasi publik mendapatkan hasil 'menuju informatif.' Kenaikan nilai yang diperoleh BNPB sangat signifikan, dimana pada 2020 lalu, nilai BNPB berada pada angka 69 atau 'cukup informatif.' Sedangkan pada tahun ini, BNPB mendapatkan nilai 82 atau 'menuju informatif.' Pencapaian yang diperoleh BNPB tercantum dalam Keputusan KIP Nomor: 10/KEP/KIP/X/2021 Tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2021.

IX. Kendala dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik pada kurun waktu tahun 2021 menemukan kendala kurangnya anggaran untuk kegiatan PPID dan SP4N lapor karena Sebagian dana digunakan untuk penanggulangan pandemi Covid-19 dan belum ada personil yang ditugaskan khusus dalam pemberian pelayanan PPID dan SP4N lapor.

X. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Adanya dukungan anggaran untuk pelayanan PPID dan SP4N lapor agar dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM melalui pelatihan maupun diklat terkait layanan publik khususnya layanan di PPID. Selain itu ada penambahan

personil khusus dengan sistem piket dalam layanan secara online melalui website PPID BNPB, maupun melalui media sosial BNPB seperti Facebook, Twitter dan Instagram.

XI. Penutup

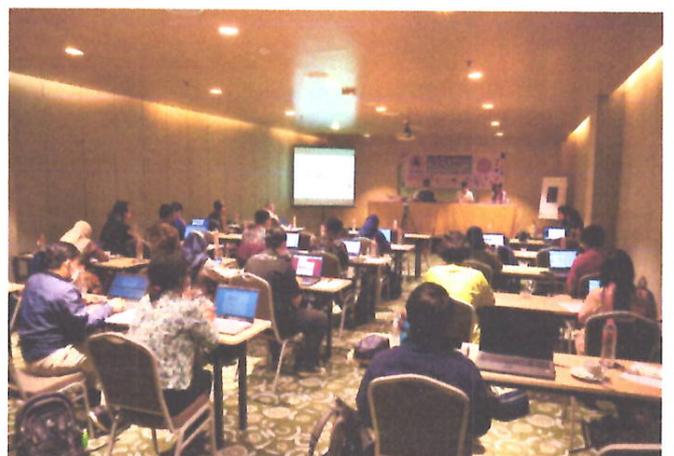
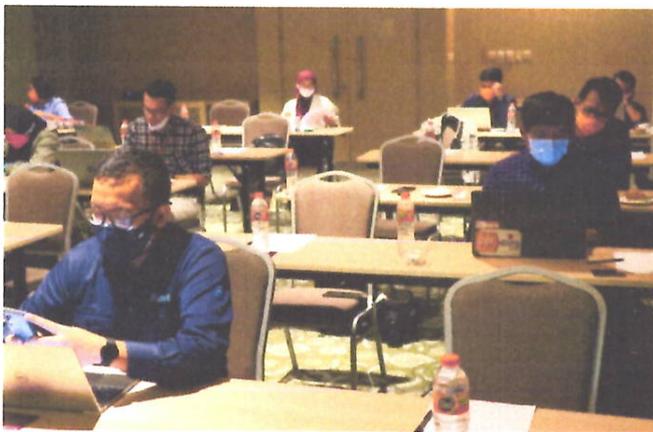
Demikian, laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dalam pengambilan kebijakan ke depannya dalam mengembangkan pelayanan PPID BNPB dan SP4N Lapo yang lebih baik.

Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan,
Komunikasi Kebencanaan



Abdul Muhari, Ph.D
NIP. 197901032005021004

I. Lampiran Foto kegiatan PPID



II. Piagam Penghargaan Kategori Menuju Informatif



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

ANUGERAH

Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021 Kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Sebagai Badan Publik



Jakarta, 26 Oktober 2021
Komisi Informasi Pusat
Ketua

GEDE NARAYANA

